

Pemeringkatan *E-Government* di Kota Makassar

E-Government Rangking in Makassar

Tasmil

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Makassar
Jl. Prof. Abdurrahman Basalama II No.25 Makassar Telp. 0411-4660084

tasmil@kominfo.go.id

Diterima: 2 Desember 2013 || Revisi: 11 Desember 2013 || Disetujui: 12 Desember 2013

Abstrak - Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* (*e-Gov*) merupakan langkah awal implementasi *e-Gov* di Indonesia. Melalui pengembangan *e-Gov*, penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah telah dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mengukur implementasi *e-Gov*, maka diperlukan sebuah *assesment* untuk melihat sejauhmana kesiapan pemerintah baik pusat maupun daerah. Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) merupakan ukuran implementasi *e-Gov* di Indonesia. Penelitian ini melakukan pemeringkatan *e-Gov* di Kota Makassar yang mencakup 18 SKPD. Data penelitian diperoleh dengan pendekatan kualitatif dan analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-Gov* di Kota Makassar dalam kategori belum baik. Berdasarkan hasil pemeringkatan *e-Gov* pada 18 SKPD hanya satu SKPD dengan kategori “Baik Sekali”, tujuh kategori “Baik” dan selebihnya masih dalam kategori “Kurang” dan “Sangat Kurang”. Pemerintah Kota Makassar diharapkan dapat melakukan perbaikan untuk implementasi *e-Gov* yang lebih baik.

Kata Kunci: pemeringkatan, *e-Government*, Kota Makassar, PeGI

Abstract - *Inpres No.3 Tahun 2003 on National Policy and Strategy Development of e-Government (e-Gov) is the first step in the implementation of e-Gov in Indonesia . Through the development of e-Gov to restructure management systems and work processes within the government by optimizing the use of information technology. To measure the e-Gov implementation, it require an assessment to see how far governments are prepared for both central and local government. Indonesia e-Government rating (PeGi) is the implementation measure of e-Gov in Indonesia. Research sites in Makassar include 18 SKPDs . Data were obtained with a qualitative approach and data analysis deskriptif. The results showed that the implementation of e-Gov in Makassar in either category yet. Based on the result of the e-Gov in 18 SKPDs only one on education category of "Very Good", seven categories of "Good" and the rest is still in the category of "Less" and "Very Less" . Makassar City Government is expected to make improvements to the implementation of e-Gov better .*

Keywords: rangking, *e-Government*, Makassar, PeGi

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat menjadi kebutuhan utama dalam mengembangkan masyarakat informasi (*information society*) dan masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*). Kegiatan *World Summit on the Information Society* (WSIS) yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2003 telah melahirkan keputusan bahwa pada tahun 2015 setiap negara mengupayakan lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit terhubung dengan jaringan komunikasi dan informasi, serta 50% penduduk dunia memiliki kemampuan mengakses informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen negara-negara di dunia untuk mewujudkan masyarakat informasi.

Sebagai tindak lanjut WSIS tersebut di atas, maka Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Gov* dimana kebijakan tersebut merupakan payung hukum dari seluruh kebijakan detail teknis di bidang *e-Gov*. Pengembangan *e-Gov* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Gov* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasi pemanfaatan teknologi informasi. *E-Gov* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses

kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer* (G2C), *Government-to-Business* (G2B) serta *Government-to-Government* (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Munculnya inisiatif-inisiatif pemerintah tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan baik internal maupun eksternal khususnya kesiapan dalam menerapkan *e-Gov*. Langkah awal yang diambil oleh pemerintah belum jelas arahnya. Apakah langkah yang diambil sudah tepat sasaran untuk menuju penerapan *e-Gov*. Untuk bisa mengukur kesiapan pemerintah dalam penerapan *e-Gov*, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang menangani kebijakan mengenai teknologi, informasi, dan komunikasi telah melakukan evaluasi untuk menentukan standar baku dalam pemeringkatan penerapan *e-government* yang tertuang dalam Pemeringkatan *E-Government* Indonesia (PeGi, 2013). Berdasarkan hasil penelitian (Ariyani, 2013) tentang kajian kerangka kerja metode pemeringkatan *e-Gov* yang mengacu pada 5 dimensi yaitu kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, metode ini relevan dilakukan pada tingkat kabupaten/kotamadya.

Pemeringkatan *e-Gov* telah dilaksanakan sejak tahun 2007 yang mencakup pemeringkatan tingkat departemen, propinsi dan kabupaten/kota. Pemeringkatan *e-Gov* yang telah dilakukan Kementerian Kominfo yakni pemeringkatan *e-Gov* di Propinsi Riau tahun 2010, Propinsi Jawa Timur tahun 2010 dan 2011, Propinsi Jawa Barat tahun 2010, Propinsi Sumatera Utara tahun 2011, Propinsi Jambi tahun 2011, Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 dan Propinsi Aceh 2011 (PeGi, 2013).

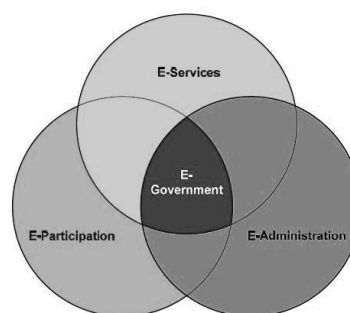
Penelitian ini difokuskan untuk mengukur implementasi *e-Gov* di Kota Makassar karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Magdalena (2003) bahwa kondisi *e-Gov* di Kota Makassar masih jauh dari ideal. Selain itu, pemeringkatan *e-Gov* yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, belum pernah dilaksanakan di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar. Hal ini yang mendorong untuk

melihat sejauhmana implementasi *e-Gov* di Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka permasalahan penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi *e-Gov* di Kota Makassar dan peringkat *e-Gov* di Kota Makassar?”. Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan referensi bagi pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi Informatika RI mengenai gambaran implementasi *e-Gov* di Kota Makassar dan sebagai kerangka acuan bagi pemerintah Kota Makassar dalam mengevaluasi apa saja yang telah dan perlu diperbaiki dalam implementasi *e-Gov* di Kota Makassar.

Pengertian *e-Gov* secara redaksional berbeda-beda seperti dirumuskan oleh beberapa lembaga atau pakar. Namun secara substansif, berbagai definisi tersebut relatif sama yaitu tentang pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah. PBB mendefinisikan *e-Gov* sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penerapannya oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan publik ke masyarakat (Fadhillah dkk, 2011).

Definisi dari Bank Dunia juga relatif luas, yaitu “*e-Gov* merujuk pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah (misalnya *wide area networks*, *Internet*, dan *mobile computing*) yang mempunyai kemampuan untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, bisnis, serta pemangku kepentingan lainnya dari pemerintah” (Fadhillah dkk, 2011).



Gambar 1 Tiga wilayah E-Government

Seorang peneliti di bidang *e-Gov* (Gregory G. Curtin, 2007) mendefinisikan *e-Gov* sebagai: “Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk beroperasi lebih efektif dan transparan; untuk menyediakan informasi lebih banyak dan lebih baik kepada publik; serta untuk memfasilitasi partisipasi individu, bisnis, dan kelompok lainnya di segenap masyarakat di sebuah

negara”. Curtin selanjutnya menjelaskan *e-Gov* sebagai irisan dari tiga wilayah yaitu *e-services*, *e-participation*, dan *e-administration* seperti disajikan dalam Gambar 1 (Gregory G. Curtin, 2007).

E-administration terutama berhubungan dengan proses *backend* dan struktur internal pemerintahan. Jadi fokusnya internal. *E-services* menghubungkan *backend processes* yang menghasilkan informasi dan layanan dengan pengguna akhir, misalnya masyarakat (*government to citizen*, atau *G to C*), bisnis (*government to business*, atau *G to B*), dan pemerintah (negara) lainnya (*government to government*, atau *G to G*). Selanjutnya *e-services*, memelihara fokus internal dan eksternal dari pemerintah. *E-participation* menitikberatkan pada hubungan eksternal pemerintah dengan masyarakat sipil, dan mencakup masukan masyarakat terhadap pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan, akses langsung ke kantor pemerintah, *electronic voting*, jejaring sosial dan masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah, serta alat lain untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi *e-participation* utamanya berfokus eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Nur Pratiwi Johansyah dan Oky (2012) dikatakan bahwa masyarakat masih membutuhkan layanan yang cepat, mudah dan praktis dari pemerintah. Dinas Kominfo selaku SKPD yang menyediakan perangkat keras ataupun lunak diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan langsung dengan menggunakan layanan internet berbasis *e-Gov*, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan tersebut tanpa terkecuali. Menyediakan akses yang cepat dan murah adalah salah satu indikator penerapan *e-Gov*. Masyarakat berhak mengetahui informasi yang mereka butuhkan, pemerintah memiliki kewajiban menyediakan informasi tersebut melalui *website* secara lengkap.

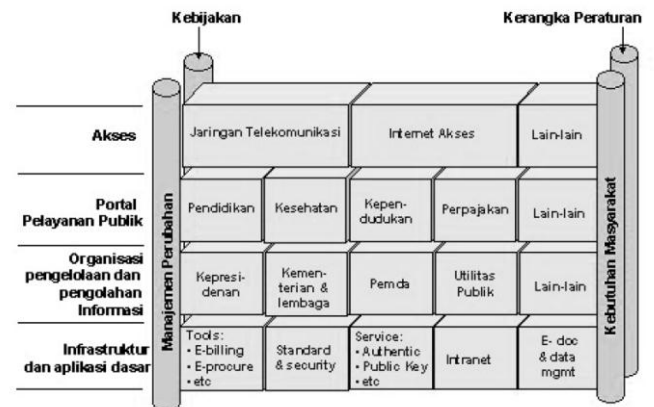
Penerapan *e-Gov* di Indonesia dilandasi adanya keinginan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi sebagai wujud pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Gov* dimana kebijakan tersebut merupakan payung hukum dari seluruh kebijakan detail teknis di bidang *e-Gov*. Pengembangan *e-Gov* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif

dan efisien. Melalui pengembangan *e-Gov* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

- (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Inpres No. 3 Tahun 2003 menjelaskan enam strategi pengembangan *e-Gov* yakni: 1) Bagaimana mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas; 2) Bagaimana menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik; 3) Bagaimana Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal; 4) Bagaimana meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi; 5) Bagaimana mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat; dan 6) Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur.

Keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik merupakan wujud pengembangan pelayanan publik yang transparan, pengembangan *e-Gov* pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2 Inpres No.3Tahun 2003 tentang *e-Government*

PeGI merupakan kegiatan yang diadakan oleh Direktorat *e-Gov* di bawah Direktorat Jenderal

Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. PeGI merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah secara nasional. PeGI merupakan metodologi untuk *assessment* kesiapan pemerintah dalam penerapan *e-Gov* yang hasil akhirnya berupa nilai yang dapat digunakan untuk menyusun peringkat. Implementasi PeGI sudah dilakukan sejak tahun 2007 pada tingkat pemerintah daerah provinsi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sistem masih perlu diuji dengan perluasan *assessment* yang dilakukan pada tingkat pemerintah kabupaten/kota.

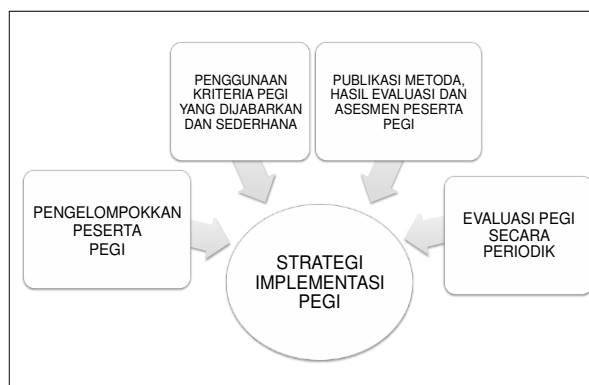
Tujuan penyelenggaraan PeGI yaitu (PeGi, 2013) :

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah
2. Memberikan dorongan bagi peningkatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan objektif
3. Melihat peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional

Salah satu upaya untuk mewujudkan suksesnya pelaksanaan PeGI, disusun beberapa strategi sebagai berikut:

1. Peserta evaluasi untuk kali ini dibatasi hanya Pemerintah Provinsi
2. Evaluasi menggunakan kriteria yang dijabarkan dengan sederhana sehingga mudah dimengerti semua pihak
3. Metoda, hasil evaluasi dan kajian dipublikasikan secara luas
4. Evaluasi dilakukan secara periodik sehingga bisa diukur tingkat kemajuannya (tren).

Penentuan peserta PeGI yang seragam akan memudahkan proses penilaian dan perbandingan peserta. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan kriteria yang dijabarkan dan sederhana sehingga semua pihak yang terkait dapat mengerti dan menangkap dengan jelas kriteria yang digunakan. Metoda dan hasil evaluasi akan dipublikasikan secara luas terutama pada pihak-pihak yang terkait dan juga pada masyarakat sehingga proses pemeringkatan akan berjalan secara transparan. Untuk lebih mudah memahami strategi implementasi PeGI telah dikonsepsikan dalam bentuk gambar seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3 Strategi Implementasi PeGI 2007

Pelaksanaan pemeringkatan, telah menentukan lima dimensi yang akan dikaji yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi itu nantinya akan memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

1. Kebijakan

Dimensi kebijakan sangat erat kaitannya dengan produk hukum dan dokumen-dokumen resmi yang mempunyai tujuan untuk memberi arah dan mendorong pemanfaatan TIK yang terdiri dari: visi dan misi, strategi pemanfaatan TIK, standar (laporan), pedoman, peraturan, dan kebijakan anggaran.

2. Kelembagaan

Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan indikator antara lain: keberadaan organisasi struktural yang lengkap (menjalankan fungsi CIO, dukungan teknis, dan lain-lain), tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas, kelengkapan unit dan aparatur (jumlah, kompetensi, jenjang karir dan status), dan legalitas (dasar hukum). Dimensi kelembagaan dinilai dengan indikator berikut:

- a. Semua hal yang berkaitan dengan lembaga, institusi, organisasi atau unit kerja yang melaksanakan fungsi mengembangkan dan implementasi *e-government* atau teknologi informasi
- b. Lembaga yang dibentuk membuat fungsi utama memberikan layanan dan dukungan teknologi informasi bagi instansi pemerintah sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawabnya.

- c. Diperlukan perumusan dan penjabaran yang jelas dari misi atau tugas lembaga atau organisasi teknologi informasi dalam instansi, yang mendukung misi besar dari instansi
- d. Dari misi yang dirumuskan diturunkan tugas yang perlu dilaksanakan dan fungsi yang perlu diperankan
3. Infrastruktur
Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pemanfaatan TIK yang terdiri dari antara lain: perangkat keras computer dan piranti lunak, jaringan komunikasi (LAN, WAN, Internet), *service delivery channel* (web, telepon, sms dan lain lain), dan fasilitas pendukung (AC, UPS, Genset, *Access Control*). Indikator penilaian dimensi infrastruktur adalah (PeGI,2013):
- 1) Ketersediaan infrastruktur (dalam spesifikasi dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan)
 - 2) Kualitas dan spesifikasi apa, kapasitasnya dan berapa jumlahnya
 - 3) Kondisi infrastruktur (dalam kesiapan berfungsi sesuai dengan kebutuhan)
 - 4) Bisa berfungsi dengan baik dan siap pakai
 - 5) Adanya penerapan tata kelola infrastruktur (inventarisasi, pengawasan, perawatan, tata cara pemanfaatan).
 - 6) Ada pencatatan, pelaporan, mekanisme monitoring dan evaluasi, SOP
4. Aplikasi
Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan dimanfaatkannya piranti lunak aplikasi yang memenuhi kriteria antara lain: dapat bekerja sesuai dengan kondisi yang ada (ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan lain-lain), dapat bekerja memenuhi kebutuhan yang ada, berfungsi mendukung proses kerja yang efisien yang memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, membawa dampak positif bagi efisiensi dan kualitas layanan, serta mampu mengikuti perubahan dari waktu ke waktu dengan mudah. Parameter untuk pengukuran dimensi aplikasi adalah :
- a. Situs web/*Homepage*
 - Adanya situs web resmi pemerintah
 - Adanya fasilitas dalam situs web resmi tersebut untuk publik dapat berinteraksi dengan pemerintah melalui situs
 - b. Aplikasi Fungsional: Pelayanan publik
 - Adanya aplikasi yang mempunyai fungsi pelayanan ke publik
 - Termanfaatkannya aplikasi fungsional pelayanan publik dengan mengikuti SOP yang sudah ditetapkan
 - c. Aplikasi Fungsional: Administrasi & Manajemen Umum
 - Adanya aplikasi yang mempunyai sistem fungsi untuk administrasi dan manajemen umum dalam lingkup internal pemerintah
 - Termanfaatkannya aplikasi fungsional administrasi dan manajemen umum dengan mengikuti SOP yang sudah ditetapkan
5. Perencanaan
Dimensi perencanaan berkaitan dengan proses perencanaan, indikatornya antara lain: adanya perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata, adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang lengkap, terdiri dari antara lain: tujuan, manfaat, gambaran kondisi saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, pendekatan, penentuan prioritas, biaya dan antisipasi kebutuhan di masa depan, pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan mengacu pada rencana pengembangan. Adapun parameter dimensi perencanaan adalah :
- a. Pengorganisasian/Fungsi
 - Adanya unit/elemen dalam Pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan Rencana Induk TIK.
 - Evaluasi terhadap Rencana Induk
 - b. Mekanisme perencanaan *Master Plan* TIK
 - Mekanisme penyusunan rencana TIK yang baku baku (sesuai dengan ketentuan Pemerintahan)
 - Kepatuhan terhadap mekanisme
 - Keterlibatan stakeholders
 - c. Dokumen *Master Plan*
 - Adanya dokumen *Master Plan* yang lengkap
 - Pelaksanaan *Master Plan*
 - Digunakan sebagai acuan implementasi TIK
 - d. Implementasi *Master Plan* TIK
 - *Master Plan* dijabarkan dalam rencana kerja yang lebih detail
 - Dokumentasi rencana kerja detail
 - Evaluasi dan revisi rencana kerja *Master Plan*

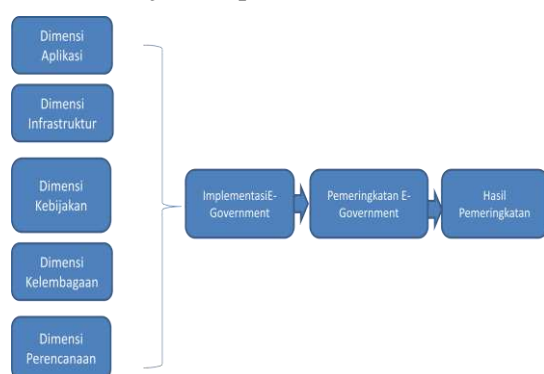
Tahapan pemeringkatan PeGI sebagai berikut:

- 1) Penjelasan proses pelaksanaan PeGI kepada para peserta yang mencakup tatacara pemeringkatan, dimensi dan indikator-indikator yang akan dievaluasi, serta informasi pendukung yang diperlukan.
- 2) Informan mempersiapkan berbagai informasi pendukung.
- 3) Wawancara dengan informan.
- 4) Melakukan klarifikasi/pemeriksaan melalui telepon, *e-mail* atau dengan melihat ke lokasi.
- 5) Melakukan *assessment* dan memberikan rating per responden. Rating yang diberikan meliputi rating per dimensi tiap-tiap peserta dan secara rata-rata keseluruhan informan.
- 6) Kompilasi dan normalisasi di tingkat Kota Makassar.
- 7) Menentukan hasil akhir pemeringkatan.
- 8) Hasil pemeringkatan dipublikasikan melalui berbagai media, situs *web* dan juga seminar-seminar agar hasilnya bisa diketahui oleh masyarakat umum.

Pemberian rating kepada para peserta dilakukan per dimensi dengan skala nilai sebagai berikut (PeGI, 2013):

3,6 – 4,0	= sangat baik
2,6 – 3,59	= baik
1,5 – 2,59	= kurang
1,0 – 1,49	= sangat kurang

Indikator penilaian pemeringkatan *e-Gov* di Kota Makassar ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4 Dimensi Pemeringkatan PEGI

METODOLOGI PENELITIAN

PeGI merupakan metodologi untuk *assessment* kesiapan pemerintah dalam penerapan *e-government* yang hasil akhirnya berupa nilai yang dapat digunakan untuk menyusun peringkat. Dalam melakukan *assessment*, cara yang dilakukan PeGI adalah dengan

melakukan penilaian terhadap indikator-indikator penerapan *e-government* yang dikelompokkan dalam 5 dimensi yakni dimensi perencanaan, kelembagaan, infrastruktur, kebijakan dan aplikasi. Berdasarkan hasil penelitian (Pipin Farida Ariyani, 2013) sangat relevan diterapkan pada instansi pemerintah kabupaten/kota.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek yang diteliti (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan fenomena/peristiwa yang ada di dalam penerapan *e-Gov* di Kota Makassar sebagai bentuk pelayanan kepada publik yang menggunakan teknologi informasi di dalam pelaksanaannya.

Penentuan fokus penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas ruang lingkup pembahasan sehingga sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, terdapat dua hal yang menjadi fokus penelitian, yaitu : 1) Implementasi *e-Gov* di Kota Makassar dan 2) Peringkat *e-Gov* di Kota Makassar.

Lokus penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana penelitian dilaksanakan. Penelitian kali ini dilaksanakan di Kota Makassar dan difokuskan pada unsur SKPD yang menjalankan urusan serta bertanggungjawab dalam pembangunan *e-Gov* di Kota Makassar. Pemilihan lokus didasarkan kepada alasan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu Kota di Sulawesi Selatan yang sudah menerapkan konsep *e-Gov* di dalam kegiatan pemerintahannya, sehingga penulis tertarik untuk mendeskripsikan penerapan *e-Gov* di daerah tersebut. Penentuan SKPD sebagai lokasi penelitian ini merupakan representatif dari seluruh SKPD yang ada di Kota Makassar.

Pada penelitian ini, teknik pemilihan informan yang akan digunakan peneliti adalah *purposive sample* yaitu, pengambilan dengan sengaja untuk memperoleh *key informan* atau orang-orang yang mengetahui dengan benar dan atau yang terpercaya. Pemilihan *key informan* dilakukan kepada orang-orang yang terlibat langsung dan mengetahui tentang penerapan *e-Gov* pada SKPD masing-masing di Kota Makassar.

Instrumen utama penelitian adalah wawancara sebagai alat utama pengumpul data agar lebih mudah

dalam mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu, berupa teks, kata-kata tertulis, serta tindakan-tindakan yang menggambarkan atau merepresentasikan orang-orang dan peristiwa-peristiwa di tempat penelitian. Selain itu, juga digunakan data statistik yang bersifat mendukung data kualitatif yang ada. Data penelitian ini diperoleh dari informan yaitu SKPD yang ada di Kota Makassar.

Analisis data yaitu, proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data (Lexy J. Moleong, 2010:280). Tujuan dari analisis data adalah untuk mengungkapkan hal-hal berikut :

1. Data apa yang masih perlu dicari.
2. Pertanyaan apa yang perlu dijawab.
3. Metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru.
4. Kesalahan apa yang harus diperbaiki.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu, analisis dilakukan setelah dikumpulkan data melalui wawancara di lapangan. Analisis data terdiri dari tahapan antara lain :

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dengan kata lain reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data.

2. Penyajian Data

Dalam tahap ini berbagai data yang telah terkumpul dan dianggap penting selanjutnya digambarkan dalam bentuk deskripsi untuk mempermudah melihat gambaran keseluruhannya sehingga dapat membantu merumuskan kesimpulan yang tepat.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahapan terakhir dari analisis data adalah menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan catatan di lapangan, penyimpanan, kecakapan, serta kejelian di dalam menganalisis data kasar tersebut.

Adapun analisis data di dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Melakukan pengamatan terhadap *e-Gov* yang telah diterapkan di Kota Makassar. Pengamatan dilakukan secara langsung pada SKPD yang ada di Kota Makassar,
- 2) Melampirkan pertanyaan kepada *key informan* dan informan lainnya seputar penerapan *e-Gov* di Kota Makassar.
- 3) Mendeskripsikan pemeringkatan *e-Gov* di Kota Makassar. Menarik kesimpulan berdasarkan berbagai data yang telah didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi *e-Gov* di Kota Makassar

1. Dimensi Perencanaan

a. Pengorganisasian/Fungsi: Sebagian besar SKPD telah memiliki organisasi/fungsi khusus untuk Implementasi *e-Gov*. Dari 18 SKPD yang diteliti 11 diantaranya telah memiliki fungsi *e-Gov*.

b. Sistem Perencanaan : Sebagian besar SKPD telah memiliki perencanaan yang baku, akan tetapi tidak terstruktur. 11 dari 18 SKPD telah memiliki sistem perencanaan.

c. Dokumentasi: Sebagian besar SKPD sudah memiliki Sistem dokumentasi perencanaan TIK. 11 dari 18 SKPD telah memiliki dokumentasi perencanaan TIK.

d. Implementasi *Master Plan*: Sebagian besar SKPD belum memiliki *Master Plan* yang jelas untuk implementasi *e-Gov* karena *Master Plan* di kelola BAPPEDA dan SKPD tidak dilibatkan secara langsung untuk perencanaan *Master Plan* TIK.

e. Pembiayaan: 3 SKPD yang belum mengalokasikan pembiayaan untuk implementasi *e-Gov*, 4 SKPD belum memberikan alokasi khusus untuk pembiayaan dalam dokumen perencanaan dan selebihnya sudah mengalokasikan pembiayaan untuk dokumen perencanaan TIK.

2. Dimensi Kebijakan

a. Proses Kebijakan: Perencanaan dan pembiayaan dari pihak BAPPEDA sehingga kebijakan hanya dilakukan BAPPEDA. Hanya beberapa instansi yang membuat manajemen terkait kebijakan.

b. Visi dan Misi berkaitan dengan TIK : 6 SKPD sudah memiliki visi dan misi terkait TIK

- selebihnya belum memiliki visi dan misi yang spesifik terkait implementasi *E-Gov*.
- c. Strategi Penerapan Kebijakan : 3 SKPD belum memiliki dokumen strategi penerapan kebijakan TIK, 4 SKPD belum lengkap dan selebihnya sudah berjalan dengan baik.
 - d. Pedoman: Sebagian besar SKPD belum memiliki pedoman yang jelas untuk penerapan kebijakan TIK.
 - e. Peraturan: hanya 3 SKPD yang sudah memiliki regulasi terkait TIK dari 18 SKPD.
 - f. Keputusan Instansi : hanya 9 SKPD yang sudah memiliki keputusan ketetapan terkait TIK dari 18 SKPD.
 - g. Skala Prioritas :karena tidak ada kebijakan TIK maka sebagian besar SKPD tidak memiliki penentuan skala prioritas kebijakan TIK.
 - h. Manajemen Risiko/Evaluasi: hanya 8 SKPD evaluasi internal dan independen sudah berjalan dengan baik.
3. Dimensi Infrastruktur
- a. Data Center: 9 SKPD sudah memiliki data center, 5 SKPD belum lengkap, selebih belum memiliki data center.
 - b. Jaringan Data: sebagian besar sudah memiliki jaringan data, hanya 3 SKPD belum memiliki jaringan data, 3 belum lengkap.
 - c. Keamanan Data: 9 SKPD sudah memiliki perangkat keamanan data, 5 SKPD belum lengkap dan 4 SKPD belum memiliki perangkat keamanan data.
 - d. Fasilitas Pendukung: 11 SKPD sudah fasilitas pendukung TIK, 3 SKPD belum lengkap dan selebihnya belum memiliki fasilitas pendukung.
 - e. Disaster *Recovery*: hanya 3 SKPD yang sudah memiliki fasilitas disaster, 10 SKPD belum lengkap dan 5 SKPD belum memiliki perangkat tersebut.
 - f. Pemeliharaan TIK: 6 SKPD belum memiliki program pemeliharaan perangkat TIK, satu belum terjadwal, selebihnya sudah memiliki jadwal pemeliharaan TIK.
 - g. Inventaris Peralatan TIK: 8 SKPD telah memiliki SOP, manajemen aset, pemahaman tentang inventaris dan pemahaman tentang aset, 4 belum berjalan dengan baik dan 6 SKPD belum memiliki inventaris peralatan TIK.
4. Dimensi Kelembagaan
- a. Keberadaan Struktur Organisasi: sebagian besar SKPD sudah memiliki organisasi secara resmi akan tetapi hanya 9 yang masih berfungsi dengan baik, 6 SKPD belum berfungsi maksimal dan 3 SKPD belum memiliki struktur organisasi terkait TIK.
 - b. Tugas dan Fungsi: 10 SKPD sudah memiliki dokumen tugas dan fungsi TIK, selebihnya 5 SKPD belum memiliki fungsi yang jelas.
 - c. 15 SKPD belum memiliki dokumen TIK yang lengkap dan 3 SKPD belum memiliki dokumen TIK.
 - d. Ketersediaan Sistem dan Prosedur Kerja yang lengkap dan terdokumentasi : 9 SKPD sudah memiliki dokumen sistem dan prosedur, tata kerja dan pengaturan pelaksanaan tugas/kegiatan TIK, 7 SKPD belum memiliki dokumen lengkap dan 2 SKPD tidak memiliki dokumen tersebut.
 - e. Ketersediaan SDM dan jumlah dan tingkat kompetensi yang sesuai: 11 SKPD sudah memiliki inventarisasi/pendataan tenaga kerja yang lengkap, 5 SKPD memiliki inventarisasi yang belum lengkap, dan 2 SKPD belum memiliki inventarisasi tersebut.
 - f. Pengembangan SDM TIK: sebagian besar SKPD sudah memiliki program pengembangan SDM bidang TIK yakni 12 SKPD sudah memiliki program, 3 SKPD belum terjadwal dan 3 SKPD belum memiliki program tersebut.
5. Dirnensi Aplikasi
- a. Situs Web (*homepage*): 6 dari 18 SKPD sudah memiliki website yang menyediakan konten pelayanan publik dan 2 SKPD sudah menyediakan website interaktif dan konten lengkap. 4 SKPD belum memiliki website, selebihnya belum memiliki konten pelayanan publik yang lengkap.
 - b. Aplikasi Fungsional Utama 1: 10 SKPD memiliki aplikasi pelayanan publik, 4 SKPD belum berfungsi maksimal dan 4 SKPD belum memiliki aplikasi untuk pelayanan publik.
 - c. Aplikasi Fungsional Utama 2: 8 SKPD memiliki aplikasi administrasi dan manajemen umum, 2 SKPD belum berfungsi maksimal dan 8 SKPD belum memiliki aplikasi tersebut.
 - d. Aplikasi Fungsional Utama 3 : hanya ada 2 SKPD yang memiliki aplikasi administrasi legislasi dari 18 SKPD.
 - e. Aplikasi Fungsional Utama 4 : 7 SKPD sudah memiliki aplikasi manajemen pembangunan, 2 SKPD belum berfungsi

- maksimal dan 9 SKPD belum memiliki aplikasi tersebut.
- f. Aplikasi Fungsional Utama 5 : 10 SKPD memiliki aplikasi keuangan, 6 SKPD belum berfungsi maksimal dan 2 SKPD belum memiliki aplikasi tersebut.
- g. Aplikasi Fungsional Utama 6 : hanya 5 SKPD memiliki aplikasi manajemen kepegawaian, 4 SKPD belum berfungsi maksimal, dan 9 SKPD belum memiliki aplikasi tersebut.
- h. Dokumentasi : 7 SKPD memiliki dokumentasi aplikasi, 4 SKPD belum berfungsi maksimal dan 7 SKPD belum memiliki aplikasi tersebut.
- i. Inventarisasi Aplikasi TIK : 6 SKPD memiliki aplikasi dokumentasi mengenai inventaris aplikasi, 5 SKPD belum lengkap dan 7 SKPD belum memiliki aplikasi tersebut.
- j. Interoperabilitas Aplikasi : 9 SKPD memiliki aplikasi yang mampu bertukar data/informasi antar aplikasi, 2 SKPD belum maksimal dan 7 SKPD belum memiliki aplikasi yang memiliki kemampuan seperti itu.

Tabel 1 Hasil penelitian pemeringkatan *e-Gov* di Kota Makassar

Instansi	R	K	I	L	A	Rata-Rata	Kategori
Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan	3,4	3,6	3,3	4,0	3,9	3,6	Sangat Baik
Kantor Arsip, Perpustakaan & PDE	3	2,9	3,6	3,0	3,2	3,1	Baik
Dinas Kesehatan	2,8	2,4	3,6	3,2	2,8	3,0	Baik
BAPPEDA	3,4	3,0	2,3	3,0	2,6	2,9	Baik
Dinas Pekerjaan Umum	3	2,8	3,0	2,2	2,5	2,7	Baik
Dinas Tata Ruang	2,8	2,5	2,9	3,0	2,3	2,7	Baik
Kantor Kependudukan Catatan Sipil	2,6	2,0	2,9	3,0	2,6	2,6	Baik
Dispenda	2,8	2,6	2,4	2,6	2,4	2,6	Baik
Dinas Penataan dan Kebersihan	2,6	2,5	2,6	2,6	2,1	2,5	Kurang
Kesbang	3	2,3	2,6	2,6	1,6	2,4	Kurang
Dinas Informasi dan Komunikasi	2,8	2,4	2,3	3,0	1,6	2,4	Kurang
Dinas Sosial	2	2,3	2,7	2,0	1,7	2,1	Kurang
Dinas Pemadam Kebakaran	1,8	2,4	2,1	1,8	2	2,0	Kurang
Badan Diklat	2,2	2,1	1,6	3,0	1,2	2,0	Kurang
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1,6	1,3	1,7	2,0	1,8	1,7	Kurang
Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar	1,4	1,4	1,0	2,0	1,5	1,5	Sangat Kurang
Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan	1	1,0	1,0	1,0	1	1,0	Sangat Kurang
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	1,0	1,0	1,0	1	1,0	Sangat Kurang

Keterangan: R (Perencanaan); K (Kebijakan); I (Infrastruktur); L (Kelembagaan); A (Aplikasi)

Pemeringkatan *e-Gov* di Kota Makassar

Hasil pemeringkatan *e-Government* di kota Makassar berdasarkan hasil penelitian untuk masing-masing SKPD ditunjukkan pada Tabel 1.

KESIMPULAN

Hasil Penelitian pemeringkatan *e-Gov* di Kota Makassar menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD di Kota Makassar telah memiliki struktur organisasi akan tetapi Sebagian besar SKPD belum memiliki

Master Plan yang jelas untuk implementasi *e-Gov* karena *Master Plan* dikelola BAPPEDA dan SKPD tidak dilibatkan secara langsung untuk perencanaan *Master Plan* TIK sehingga arah implementasi *e-Gov* menjadi tidak jelas. Begitupun juga dengan implementasi *e-Gov* di Kota Makassar pada 18 SKPD terdapat 1 SKPD “Sangat Baik”, 7 SKPD kategori “Baik”, 7 SKPD kategori “Kurang” dan 3 SKPD kategori “Sangat Kurang”. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa implementasi *e-Gov* di Kota Makassar masih dalam kategori “Kurang”. begitupun juga dengan peringkat *e-Gov* di Kota Makassar, kantor pelayanan administrasi perizinan dengan kategori “Sangat Baik”, Dinas Kesehatan, kantor arsip, perpustakaan dan PDE, BAPPEDA, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Penataan dan Kebersihan, Kantor kependudukan dan Capil, Dinas PU, Dinas Tata Ruang dengan kategori “Baik”. Badan Diklat, Kesbang, Dinas Informasi dan Komunikasi, Dinas Sosial, Dinas Pemadam kebakaran dan Badan Diklat, serta Disperindag kategori “Kurang”. Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kategori “Sangat Kurang”.

Berdasarkan hasil penelitian disarankan perlunya sinergitas seluruh SKPD di Kota Makassar berkaitan dengan implementasi *e-Gov*. BAPPEDA selaku penentu kebijakan implementasi *e-Gov* sebaiknya melibatkan seluruh SKPD yang ada dalam penyusunan *e-Gov* di Kota Makassar. Penelitian ini hanya membahas satu indikator untuk mengukur implementasi *e-Gov* di Kota Makassar, diharapkan kedepannya dapat melakukan komparasi metode pengukuran PeGi dengan metode pengukuran yang lainnya. Selain itu, perlu mengkaji lebih mendalam implementasi *e-Gov* di Kota Makassar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada SKPD-SKPD dan pembantu lapangan yang telah membantu dalam proses pengumpulan data penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, P. F., (2013). *Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya*. BIT VOL 10 No 1 April 2013.
- Eka Putra Renny dan Rika Valentina (2010). *Penerapan E-Government Pada Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Prima Di Sumatera Barat (Studi Di Kabupaten Solok dan Kota Padang)*, Spirit Publik Vol 6, Nomor 2 halaman 71-90
- Fadhillah, Evi and Nugroho, Kandung Sapto and Fuad, Anis (2011). *Kesiapan Penerapan E-Government di Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang* diakses tanggal 12 Desember 2013
- Gregory Curtin(2007). *A Comparative Analysis of E-Government in Latin America: Applied Findings from United Nations E-Government Readiness Reports*, IGI Global Disseminator of Knowledge USA
- Moh. Nazir. Ph. D (2004), *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2003), Hlm: 16
- Nur Pratiwi Johansyah & Oky, (2012). *Elektronik government dan pelayanan publik di Kota Makassar*, <http://repository.unhas.ac.id> diakses tanggal 15 Oktober 2013
- PeGi (2013a). *Pemeringkatan e-Government di Indonesia*”, www.pegi.layanan.go.id diakses tanggal 15 Oktober 2013
- PeGI (2013b), *Strategi Pemeringkatan E-Government Kementerian, KOMINFO,2007*
- Widya S, Mirma Yuda F, Hanun Putri P. *Model Pemeringkatan Website Pemerintah Daerah Indonesia*, Seminar dan Cal For Paper Munas APTIKOM Poltek Telkom,2010